

Hikmah Ramadan

Puasa dan Korupsi

MONYET berebut makanan hanya ketika merasa lapar. Tetapi manusia tega merampas hak-hak sesama meski dalam kondisi sangat kaya dan jaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerakusan bukan sekadar dorongan biologis, melainkan sifat mental yang tidak mengenal batas.

Puasa mengajarkan kita untuk mencukupkan diri sesuai kebutuhan. Ketika berpuasa, kita menahan diri dari makan dan minum, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin melatih kesadaran akan kecukupan. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan juga mengendalikan hawa nafsu, termasuk sifat rakus dan tamak.

Sayangnya, dalam realitas sosial, kita sering menjumpai orang-orang yang tidak pernah merasa cukup. Kasus korupsi yang terus terungkap belakangan ini menjadi bukti nyata. Banyak pejabat dan pengusaha yang sudah kaya raya, tetapi tetap tergoda untuk menyelewengkan uang rakyat. Mereka lebih memilih mengejar sesuatu yang belum dimiliki daripada bersyukur dan menikmati apa yang telah ada.

Sifat tamak ini menciptakan ketidakadilan. Harta yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama justru dikuasai oleh segelintir orang. Akibat perilaku koruptif, kesenjangan sosial semakin lebar, dan rakyat kecil semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Puasa menawarkan solusi moral atas masalah korupsi. Dengan berlatih menahan diri, kita diajarkan untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan lebih bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Jika semangat puasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan



M Husnaini

lebih mudah merasa cukup dan terhindar dari sikap rakus yang merugikan banyak orang.

Selain itu, puasa juga menanamkan nilai-nilai empati dan solidaritas. Saat merasakan lapar dan haus, kita dapat memahami bagaimana perjuangan orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan sehari-hari. Ini seharusnya menumbuhkan kesadaran untuk lebih peduli dan berbagi dengan sesama. Dalam Islam, berbagi dengan yang membutuhkan, seperti melalui zakat dan sedekah, menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan ketimpangan sosial.

Jika nilai-nilai yang diajarkan dalam puasa benar-benar diterapkan, maka kita akan memiliki masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Orang-orang tidak akan lagi berlomba-lomba menumpuk kekayaan dengan cara korupsi, tetapi justru mencari keberkahan dalam berbagi dan membantu sesama. Dengan begitu, puasa bukan hanya menjadi ibadah pribadi, tetapi juga menjadi solusi sosial yang nyata.

Akhirnya, kepuasan sejati bukanlah pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar kita bisa bersyukur dan berbagi. Puasa mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal mengumpulkan harta, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan harta untuk kebaikan bersama. Jika kita berhasil menerapkan esensi puasa dalam kehidupan, maka kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. (*)-f

M Husnaini SPdI MPdI PhD, Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

UNTUK EMPAT TERSANGKA
Berkas Pagar Laut Masuk Kejagung

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah menerima berkas perkara dugaan pemalsuan sertifikat terkait pagar laut Tangerang yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Terdapat empat berkas perkara yang diterima Kejagung.

"Informasinya kemarin (Kamis, 13/3) sore, jajaran jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) sudah menerima berkas perkara terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Jumat (14/3).

Sebagai informasi, dalam kasus tersebut, ditetapkan empat tersangka, yakni Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa. Untuk selanjutnya, JPU akan meneliti dan mempelajari berkas perkara terlebih dahulu lantaran berkas baru diterima.

"Ada waktu 7 hari bagi penuntut umum untuk menentukan sikap apakah berkas perkara ini sudah lengkap atau belum. Itu namanya P-18. Nanti dalam

waktu 14 hari, kalau seandainya berkas perkaranya belum lengkap, maka penuntut umum akan menyampaikan, memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi," ujarnya.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri menangani kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta autentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik terkait dengan penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 17 sertifikat hak milik (SHM) Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dari pemeriksaan, didapatkan informasi bahwa area pagar laut di Tangerang sudah memiliki SHGB dan SHM dengan rincian 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan serta 17 bidang SHM yang berasal dari girik.

Sejumlah saksi dan tempat telah diperiksa, termasuk kantor dan rumah Kades Kohod Arsin. Beberapa barang bukti juga telah diamankan, di antaranya alat cetak yang diduga untuk memalsukan girik. (Ant/Has)-f

DPR SIDAK KANTOR PFN
Kini Kondisinya Memprihatinkan

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor PT Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta, Jumat (14/3), tetapi Direktur Utama PT PFN yang baru, yakni Riefan Fajarsyah atau Ifan Seventeen baru tiba setelah 40 menit kemudian.

Dasco beserta jajaran sidak ke Kantor PFN yang berada di Jalan Otto Iskandardinata pukul

09.00 WIB, setelah sebelumnya juga sidak ke Pasar Kramat Jati untuk mengecek kondisi minyak goreng. Namun, Ifan ternyata belum ada di lokasi dan baru tiba 09.40 WIB.

"Iya, kita lihat dinamika, kita sidak. Dan kita tadi berpikiran, benar-benar ini sangat kita dukung perusahaan film ini jadi pusat konten negara," kata Dasco.

Awalnya, para jajaran dari DPR itu tiba dan langsung me-

nunggu di sebuah ruangan yang berada di gedung utama kantor tersebut. Setelah Ifan tiba, jajaran DPR RI bersama Ifan lalu mengecek kondisi gedung-gedung lainnya di kompleks Kantor PFN tersebut.

Selama kunjungan, para pimpinan dan anggota DPR RI itu diberi petunjuk Head of Corporate Secretary PT Produksi Film Negara (Persero) Ihsan Chairdiansyah terkait kondisi ruang-ruangan produksi di PFN. Adapun ruangan-ruangan yang dikunjungi mulai dari ruangan studio, pelatihan, ruangan yang disewakan untuk umum, hingga bangunan yang sempat digunakan untuk memproduksi tayangan Si Unyil di masa silam.

Dasco mengatakan, pihaknya akan meminta kepada pemerintah untuk membantu memajukan industri film Indonesia menjadi bangkit. Menurutnya, kondisi PFN beserta kesejahteraan pegawainya saat ini memprihatinkan.

"Semuanya kurang, peralatan nggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi memprihatinkan, sarana pendukung sangat minim," ujarnya.



KR-Antara/Asprilla Dwi Adha

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad jajaran Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama PT PFN Riefan Fajarsyah melihat boneka film Si Unyil di Kantor PT PFN, Jakarta.



KR-Antara/Sulthony Hasanuddin

POTENSI CURAH HUJAN TINGGI: Pengendara sepeda motor menggunakan payung saat hujan di Kawasan Senopati, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pada periode 21-31 Maret sebagai masa cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai karena tingginya curah hujan di kisaran 200-300 mm di Pulau Jawa, sehingga berpeluang memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sampai akhir Maret atau menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

PERCEPATAN PENGANGKATAN CPNS-PPPK
Pemerintah Putuskan Pekan Depan

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, paling lambat pekan depan Pemerintah akan menyampaikan keputusan tentang percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan," kata Dasco di Jakarta, Jumat (14/3).

Beberapa hari lalu, Dasco mengatakan, DPR sudah memberi masukan kepada Pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR. Pihaknya meminta Pemerintah menggelar simulasi-simulasi percepatan pendataan dan merapikan pendataan.

Menurutnya, DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dipercepat dan semuanya diangkat pada tahun 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan perkembangan

pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sedang diurus oleh pemerintahannya. "Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo.

Presiden lebih lanjut menunjukkan gestur jempol sebagai isyarat yang memperkuat bahwa ketentuan terkait pengangkatan CASN 2024 memang sedang digodok.

Adapun Pemerintah sebelumnya menyesuaikan atau menunda pengangkatan CPNS, dari sebelumnya yang direncanakan sekitar pertengahan 2025 menjadi Oktober 2025. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan, hal itu di-

lakukan dalam rangka memperbaiki tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan/atau CPPPK untuk mengoptimalkan keterisian formasi. Kepala BKN Zudan Arif menjeyutkan, formasi CPNS Tahun Anggaran (TA) 2024 saat ini hanya terisi 72,69 persen, sedangkan CPPPK TA 2024 baru terisi 67,3 persen dan kini masih berlangsung tes PPPK Tahap II.

"Karena formasi belum terisi lengkap, kami bisa melakukan optimalisasi formasi dengan penyesuaian jadwal ini," ujar Zudan.

Dijelaskan pula, formasi CPNS TA 2024 yang telah dimanfaatkan instansi sebanyak 246.390 orang sehingga yang terisi hanya 179.090 orang atau 72,69 persen formasi. (Ant/San)-f

MORATORIUM DENGAN ARAB SAUDI DICABUT
RI Segera Kirim 600.000 Pekerja Migran

JAKARTA (KR) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) segera mengirimkan sekitar 600.000 orang pekerja migran ke Arab Saudi setelah moratorium (penghentian sementara) kerja sama bilateral penempatan pekerja dengan negara tersebut, dicabut.

Rencana pengiriman pekerja migran itu disampaikan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3). "Kita akan membuka ini dan kami kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia

dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikan kembali pembukaan tersebut," kata Karding.

Ia merinci pengiriman 600.000 orang pekerja ke Arab Saudi itu terdiri 400.000 orang pekerja domestik lingkungan rumah tangga dan 200.000 orang lainnya adalah pekerja formal. Pengiriman pekerja migran Indonesia itu akan disahkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat di Jeddah.

Kemudian untuk pemberangkatan tahap awal pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dilakukan mulai Juni 2025 dengan kuota yang nantinya

disesuaikan dari Pemerintah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, usai mendapatkan laporan ini, menyetujui pembukaan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dan meminta untuk disiapkan skema pelatihan untuk pekerja.

Moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kebijakan moratorium itu karena adanya penyelundupan sedikitnya 25.000 orang pekerja setiap tahun yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal atau nonprosedural. (Ant/Obi)-f

KAPOLRES NGADA DICOPOT
Polri Tak Akan Beri Toleransi

JAKARTA (KR) - Kadiv Pro-pam Polri Irjen Pol Abdul Karim menekankan Polri tidak akan menoleransi tindakan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyardharma Lukman Sumaatmaja (FWLS) yang merusak kepercayaan masyarakat. Komitmen itu ditunjukkan oleh kepolisian dengan menetapkan FWLS sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba serta mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada.

"Kasus ini menunjukkan bahwa kami tidak akan memberi ruang bagi anggota yang terlibat dalam tindak pidana, terlebih yang menyangkut kejahatan terhadap kaum rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Kami bertanggungjawab penuh dalam menjaga citra baik kepolisian," ucapnya di Jakarta, Jumat (14/3).

Pengambilan langkah tegas terhadap FWLS, kata dia, merupakan komitmen pimpinan Polri dalam memastikan setiap oknum yang melakukan pelanggaran hukum akan dihadapkan pada proses hukum yang adil dan transparan. "Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan akan

terus memperbaiki kualitas pengawasan serta pengendalian internal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," ujarnya.

Jenderal bintang dua itu pun berharap agar masyarakat dapat terus memberikan kepercayaan kepada Polri meskipun ada oknum yang merusak citra tersebut. "Kami akan terus berupaya menjaga kualitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kami ambil senantiasa berorientasi pada keadilan dan kepentingan publik," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut FWLS diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) akibat perbuatannya. "Dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, mengunggah, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur," katanya. (Ant/Has)-f